

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Civil society dan kewarganegaraan masih erat kaitannya. Dimana, *civil society* terdiri dari masyarakat yang anggotanya adalah para warga negara, sehingga kesamaan status diantara setiap anggota masyarakatnya terletak pada kewarganegaraannya. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:266).

Civil society menempatkan masyarakat di posisi lebih tinggi dibandingkan negara. Adapun *civil society* hadir sebagai penyeimbang negara, sehingga negara pun tidak bisa berbuat sewenang-wenang, harus pula memperhatikan setiap kepentingan serta hak individu yang terdapat di dalam *civil society*. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:267).

Kewarganegaraan dan warga negara merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Warga negara (*citizen*) adalah individu yang menetap disuatu negara dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada pasal 1 poin 2 “kewarganegaraan (*citizenship*) adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”.

Setiap warga negara dengan status kewarganegaraan yang sah, pasti memiliki sebuah hak dan kewajiban. Di Indonesia khususnya, hak otomatis dimiliki mulai pada saat warga negara tersebut lahir. Tidak hanya itu, warga negara pun mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berfungsi untuk melindungi dirinya.

Ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya adalah:

1. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara dan sejenisnya, maka akan dikenai hukuman. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:129).

Terdapat beberapa hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, salah satunya adalah mendapatkan sebuah pendidikan non-formal. Baik dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Karena pada dasarnya, pendidikan harus merata.

“Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis”. (Miriam Budiarjo, 2008:46). Sebagai bagian dari kewarganegaraan, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah swt. untuk saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan dan proses sosial, juga syarat dalam terjadinya sebuah aktivitas yang berbentuk sosial.

Civil society bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, serta keterikatan dengan norma atau

nilai hukum yang diikuti oleh warganya. (Muhammad AS Hikam, 2015:3). Hal tersebut, berkaitan pula dengan aktivitas sosial yang sering kita saksikan salah satunya adalah sebuah kelompok yang berusaha membuat pergerakan untuk sebuah perubahan nyata dengan kesukarelaan, keswadayaan, serta kemandirian yang tinggi. Di dalamnya berisi pendidikan, kemanusiaan, ketertiban, dan lain sebagainya, sehingga dapat berpengaruh serta bermanfaat di dalam sebuah kehidupan. Dari aktivitas sosial tersebut, memunculkan sebuah pemikiran juga pandangan dari segelintir masyarakat untuk membuat suatu hal yang belum terlaksanakan oleh pemerintah sebagai usaha dalam mendobrak keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pendidikan non-formal.

“Terdapat beberapa faktor yang ada di dalam keberlangsungan suatu proses interaksi sosial yaitu faktor sugesti dan faktor identifikasi. Dimana faktor sugesti ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain, sedangkan faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.” (Soerjono Soekanto, 2013: 57).

Segelintir masyarakat mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan respon pemerintah dalam sebuah pemikiran dan pandangan yang dibuat oleh mereka. Langkah pertama yang ditempuh oleh masyarakat tersebut adalah membuat suatu kelompok dan terkadang ada pula yang menamai dirinya sebagai seorang relawan atau pun komunitas. Bergabung dengan yang lainnya untuk saling bekerja sama, dengan satu pemikiran serta memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita yang telah direncanakan. Hal ini tidak semata-mata mudah, menyatukan beberapa pemikiran serta pandangan dengan kepala yang berbeda

adalah satu hal yang sulit, meskipun tujuan dari cita-cita, pemikiran, dan pandangan tersebut sama, tetapi sebuah proses yang membuatnya berbeda satu sama lain.

“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna”. (Soerjono Soekanto, 2013:66).

“Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Disatu pihak ia ingin kerja sama, dipihak lain ia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia”. (Miriam Budiarjo, 2008:46).

Sebuah kelompok atau komunitas lahir karena adanya sebuah pemikiran, pandangan, serta cita-cita yang mereka ingin wujudkan. Tetapi tidak setiap kelompok menyampaikan tujuannya dengan baik dan terstruktur, ada pula yang dalam penyampaiannya tidak menggunakan etika dan bisa dikatakan kurang baik.

Banyak kita jumpai berbagai komunitas yang terdapat di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran yang dikenal selalu menawarkan keindahan pantai serta tempat wisata lainnya, mengundang banyak wisatawan bahkan turis asing, menghipnotis setiap para pengunjung yang datang untuk selalu menghampirinya kembali.

Saat ini Pangandaran mulai gencar-gencarnya melakukan pembangunan sekaligus penataan wilayah, yang sangat jelas terlihat adalah pembangunan taman, rumah sakit umum, sarana olahraga, dan yang paling mencolok adalah pembangunan sisi pantai *bak* pantai di Hawaii. Tetapi terlepas dari itu semua, masih terdapat segelintir orang-orang yang masih peduli akan sebuah pendidikan

khususnya yang berbasis non-formal. Tidak banyak memang, tetapi ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Dimana masih ada orang-orang dan kelompok-kelompok serta komunitas yang peduli terhadap pendidikan non-formal. Karena dari sinilah karakter-karakter manusia dilatih untuk menghasilkan hal-hal yang nantinya bisa menjadi sebuah penolong khususnya bagi daerah sendiri, umumnya untuk Indonesia.

Terdapat salah satu komunitas yang sangat menarik yaitu komunitas Rumah Plankton yang dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan non-formal. Hal ini nyata, disaat kelompok atau komunitas lain menyampaikan pemikiran, pandangan, serta cita-cita dengan penyampaian yang kurang baik, komunitas Rumah Plankton ini hadir dengan hal-hal dan tujuan yang sangat terpuji. Mereka hadir dengan *genre* baru dalam sebuah pendidikan non-formal di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya membutuhkan sebuah pembaharuan yang menarik dalam proses suatu pembelajaran. Didirikan oleh beberapa orang anak muda yang berprofesi sebagai jurnalis, karena awalnya terdapat keresahan mereka akan minimnya tempat diskusi, dan kurangnya ruang baca, pada saat itu memang Kabupaten Pangandaran baru melakukan pemekaran dan minimnya ruang-ruang untuk berkreaitivitas bagi anak-anak muda.

Tidak sampai disitu, kegiatan dari komunitas Rumah Plankton sebagai ruang berkumpul komunitas kreatif anak-anak muda yang berlatar belakang mempunyai banyak hobi sosial yang berbeda mulai dari pecinta lingkungan, seni, mengajar, fotografi, dan banyak lagi dengan tujuan yang positif mendapat apresiasi yang tinggi dari pihak pemerintah Kabupaten Pangandaran. Bapak Bupati serta wakil

Bupati mengapresiasi kinerja dari Rumah Plankton tersebut. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran memberikan aset berupa bangunan untuk digunakan dan memberikan tanggungjawab penuh untuk merawat serta memanfaatkan bangunan-bangunan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak tanggung-tanggung, dua bangunan sekaligus diberikan kepada Rumah Plankton yang dikenal dengan nama *Pojok Baca* dan Pangandaran *Creative Space*.

Penulis tertarik untuk meneliti Rumah Plankton yang dapat disebut sebagai komunitas dengan salah satunya mengusung pendidikan non-formal dan menjadi sebuah suplemen dari kebijakan negara atas pendidikan non-formal. Yang mana di dalamnya terdapat hal-hal serta kegiatan yang membantu pemerintah dalam sebuah pendidikan non-formal di Kabupaten Pangandaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana analisis Rumah Plankton sebagai suplemen kebijakan negara atas pendidikan non-formal di Kabupaten Pangandaran?

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan mendalam, penulis membatasi permasalahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah, yaitu analisis Rumah Plankton sebagai suatu suplemen salah satu kebijakan negara atas pendidikan non-formal di Kabupaten Pangandaran.

D. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Rumah Plankton yang muncul sebagai salah satu pendobrak keterbatasan dalam halnya penyediaan ruang baca dan akses masyarakat untuk menyalurkan ide atau hobinya. Juga sebagai suplemen kebijakan negara dalam sebuah pendidikan non-formal yang bertempat di Kabupaten Pangandaran.

E. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta ilmu baru kepada peneliti serta Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dalam memahami masalah ini, umumnya kepada civitas akademika Universitas Siliwangi sebagai acuan untuk pihak yang membutuhkan informasi terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komunitas yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk menyalurkan pemikirannya dengan baik sehingga dapat diterima oleh pemerintah. Juga dapat menjadi informasi serta pengetahuan dalam pendidikan non-formal. Penelitian ini dapat pula digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sejenis.